

Judul : DPR Harus Transparan soal Rp601 Miliar
Tanggal : Senin, 30 Oktober 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 8

DPR Harus Transparan soal Rp601 Miliar

Pelaksanaan pembangunan akan dieksekusi oleh Kementerian PU-Pera atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

SEKJEN Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto meminta Dewan Perwakilan Rakyat lebih transparan soal dana yang dipakai untuk pembangunan kompleks parlemen. Hal itu disampaikan terkait anggaran sebesar Rp601 miliar yang dialokasikan un-

tuk biaya konsultan perencanaan.

"Rp601 miliar itu tidak rasional jika hanya untuk konsep perencanaan pembangunan. Itu sangat boros," kata Yenny saat dihubungi *Media Indonesia*, Minggu (29/10).

Pasalnya, konsultan perencanaan hanya bertugas merancang konsep pembangunan gedung, alokasi anggaran yang dibutuhkan, dan waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna DPR telah mengesahkan alokasi anggaran proyek pembangunan gedung DPR dalam APBN 2018. Anggaran yang disahkan itu mencapai Rp601 miliar yang disebut oleh DPR bakal diperuntukkan sebagai biaya konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi untuk penataan kawasan parlemen.

Yenny pun mengingatkan DPR harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) terkait anggaran pembangunan

gedung baru. Jika tidak, anggaran yang sudah dicanangkan bisa dinilai cacat secara administratif karena tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Ia menilai anggaran konsultan perencanaan kompleks DPR sebesar Rp601 miliar dianggap tidak masuk akal. Jika publik tidak diberikan transparansi anggaran itu, DPR dinilai telah

membuat *fait accompli* (keadaan yang harus diterima).

Awasi

Pernyataan Fitra tersebut seperti jawaban atas pernyataan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Pada Jumat (27/10), ia meminta semua pihak mengawasi penataan kawasan parlemen, salah satunya ialah pembangunan gedung baru.

“Marilah sama-sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan bisa diketahui seluruh orang,” ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/10).

Agus menjelaskan pelaksanaan

pembangunan akan dieksekusi oleh Kementerian PU-Pera atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan penyerahan tersebut, anggota DPR dijamin tidak terlibat dalam pembangunannya.

Agus memaparkan anggaran sebesar Rp601 miliar dalam proyek penataan kompleks parlemen masuk ke pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Agus mengaku tidak mengetahui waktu perencanaan oleh konsultan akan dimulai sebab segala urusan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah. (Nov/P-5)